

# ANALISIS SEKTOR UNGGULAN PEREKONOMIAN DAN KOMODITI PERTANIAN DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Irfan Cholid<sup>1)</sup>, Erlinda Yurisinthae<sup>2)</sup>, Komariyati<sup>3)</sup>

1) Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak

2) Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura Pontianak

email: [ei12f4n.myo@gmail.com](mailto:ei12f4n.myo@gmail.com)

## ABSTRAK

Kabupaten Kayong Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang terbentuk secara resmi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan Surat Mendagri No.135/439/SJ tanggal 27 Februari 2007. Sektor perekonomian merupakan alat pertumbuhan ekonomi yang harus diletakkan sesuai dengan fungsi tata ruang. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor basis dan komoditi pertanian unggulan di Kabupaten Kayong Utara. Pertumbuhan sektor-sektor unggulan diketahui dengan analisis LQ, DLQ, dan *Shift Share*. Data yang digunakan adalah data PDRB Kabupaten Kayong Utara dari tahun 2007-2011 atas dasar harga konstan.

Hasil penelitian diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan memiliki kontribusi besar di Kabupaten Kayong Utara diikuti dengan sektor listrik, gas, dan air minum, sektor pertambangan dan penggalan, sektor jasa-jasa, dan sektor industri pengolahan. Komoditi pertanian sub sektor tanaman bahan pangan di Kabupaten Kayong Utara dilihat dari luas panen dan produksinya komoditi padi menjadi basis satu-satunya. Hasil panen per hektar diketahui ada tiga komoditi basis yaitu padi, ubi kayu, dan ubi jalar.

Sesuai dengan RPJPD/RPJM Kabupaten Kayong Utara bahwa sektor pertanian menjadi prioritas dalam pembangunan daerah maka harus diberikan perhatian yang serius agar tidak terjadi alih fungsi lahan, pemberian modal kepada petani, serta dukungan regulasi yang lebih baik sebagai upaya dalam memajukan sektor pertanian dan tetap menjadi sektor basis.

*Kata kunci : sektor unggulan, Location Quotient, Dynamic Location Quotient, Shift Share.*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Selama ini sistem pemerintahan sangat sentralistik dengan kebijakan yang didominasi oleh pemerintah pusat (*topdown*), sedangkan pada pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi maka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan menjadi tanggung jawab daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Menurut Daryanto dan Hafizrianda (2010), melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan proses pengambilan keputusan dalam alokasi sumberdaya dan penyediaan pelayanan publik menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat dengan kewenangan yang ada.

**Tabel 1.1**  
**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU**  
**MENURUT KABUPATEN/KOTA**  
***Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Regency/City***  
**2007 – 2010**  
***(Juta Rupiah / Million Rupiahs)***

Kabupaten/Kota Regency/City [1]	2007 [2]	2008 [3]	2009*) [4]	2010**) [4]
Kab Sambas	4,152,705	4,673,551	5,251,569	5,903,391
Kab Bengkayang	1,681,057	1,925,131	2,146,184	2,356,205
Kab Landak	2,134,117	2,426,138	2,671,279	2,961,036
Kab Pontianak	7,753,214	1,883,099	2,028,578	2,218,583
Kab Sanggau	3,874,472	4,294,694	4,705,203	5,135,756
Kab Ketapang	4,184,340	4,868,436	5,126,915	5,911,730
Kab Sintang	2,745,687	3,105,961	3,483,101	3,915,648
Kab Kapuas Hulu	1,667,481	1,925,838	2,131,140	2,372,772
Kab Sekadau	868,380	974,677	1,089,094	1,216,048
Kab Melawi	692,850	773,954	856,845	957,299
<b>Kab Kayong Utara</b>	<b>656,882</b>	<b>755,930</b>	<b>834,352</b>	<b>946,723</b>
Kab Kubu Raya	-	6,892,797	7,614,573	8,800,532
Kota Pontianak	8,323,372	9,489,304	11,090,027	12,513,892
Kota Singkawang	1,780,259	2,012,951	2,225,776	2,519,158

Sumber/Source : BPS Provinsi Kalimantan Barat / BPS-Statistics of Kalimantan Barat

Tabel 1.1 terlihat bahwa dari tahun 2007 – 2010, PDRB Kabupaten Kayong Utara terus meningkat. Peningkatan ini terjadi karena adanya pertumbuhan sektor – sektor perekonomian di Kabupaten Kayong Utara. Namun meski demikian nilai pertumbuhan PDRB Kabupaten Kayong Utara yang terendah dari seluruh kabupaten yang ada di Propinsi Kalimantan Barat.

### Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah sektor perekonomian dan komoditi pertanian apa sajakah yang dapat menjadi unggulan di Kabupaten Kayong Utara?

### Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor basis perekonomian dan komoditi pertanian unggulan di Kabupaten Kayong Utara.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Nazir (1988) mengemukakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2012.

### Teknik Pengumpulan dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kayong Utara, serta lembaga-lembaga lain yang terkait. Penelitian ini menggunakan data *time series* dari tahun 2007 – 2011.

### Analisis Data

Adapun rumus LQ tersebut adalah :

$$LQ = \frac{vi/vt}{yi/yt}$$

(sumber :Daryanto dan Hafizrianda, 2010)

Keterangan :

LQ = besarnya indeks suatu sektor ekonomi

vi = nilai PDRB sektor i di Kabupaten Kayong Utara

vt = nilai total PDRB di Kabupaten Kayong Utara

yi = nilai PDRB sektor i di Provinsi Kalimantan Barat

yt = nilai total PDRB di Provinsi Kalimantan Barat

Kriteria keputusan dari hasil perhitungan LQ adalah :

- Apabila nilai  $LQ > 1$ , menunjukkan sektor i/komoditas tersebut merupakan sektor potensial/unggulan di Kabupaten Kayong Utara, artinya sektor tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan di daerahnya dan mempunyai potensi yang lebih besar untuk mengeksport produk ke wilayah lainnya.
- Apabila nilai  $LQ = 1$ , artinya peranan sektor tersebut di Kabupaten Kayong Utara setara dengan peranan sektor tersebut di daerah lain, maka ada kecenderungan sektor tersebut bersifat tertutup karena tidak melakukan transaksi ke dan dari luar wilayah, namun kondisi yang seperti ini sulit ditemukan dalam sebuah perekonomian wilayah, bisa dikatakan bahwa daerah ini berkecukupan dalam sektor tertentu.
- Apabila nilai  $LQ < 1$ , menunjukkan bahwa sektor i/komoditas tersebut bukan merupakan sektor potensial di Kabupaten Kayong Utara, artinya sektor tersebut tidak mempunyai potensi sektor ekspor di wilayah justru akan mendatangkan impor dari wilayah lain karena kekurangan sektor tertentu.

$$DLQ = \left[ \frac{(1 + g_{ij}) / (1 + g_j)}{(1 + G_i) / (1 + G)} \right]^t$$

(Sumber : Suyatno, 2000)

Keterangan :

DLQ : Dinamika/proyeksi sektor perekonomian

$g_{ij}$  : Laju pertumbuhan PDRB sektor i di Kabupaten Kayong Utara

$g_j$  : Rata-rata laju pertumbuhan PDRB total sektor i di Kabupaten Kayong Utara

$G_i$  : Laju pertumbuhan sektor i total di Propinsi Kalimantan Barat

$G$  : Rata-rata laju pertumbuhan sektor di nasional

$t$  : Selisih tahun akhir dan tahun awal (2007-2011)

Keputusan dari hasil perhitungan DLQ adalah jika hasil  $DLQ > 1$  maka sektor tersebut lebih unggul diatas rata-rata sektor lainnya dan dapat diharapkan menjadi sektor basis di masa yang akan datang. Sebaliknya jika nilai  $DLQ < 1$  maka sektor tersebut merupakan sektor *non* basis dan tidak dapat diharapkan di masa yang akan datang.

Kinerja dari sektor perekonomian digunakan analisis *Shift Share* dengan rumus matematik :

$$\Delta Y_i = PR_{ij} + PP_{ij} + PPW_{ij}$$

Atau secara rinci dapat dinyatakan :

$$Y'_{ij} - Y_{ij} = \Delta Y_{ij} = Y_{ij} (R_a - 1) + Y_{ij} (R_i - R_a) + Y_{ij} (r_i - R_i)$$

(sumber : Daryanto dan Hafizrianda, 2010)

Dimana :

$\Delta y_i$  = perubahan dalam pendapatan subsektor pertanian ke-i pada wilayah ke-i  
 $Y_{ij}$  = PDRB sektor ke-i pada Kab. Kayong Utara pada tahun dasar analisis (2007)

$Y'_{ij}$  = PDRB sektor ke-i pada Kab. Kayong Utara pada tahun akhir analisis (2011)

$Y_i$  = PDRB sektor ke-i pada Provinsi KalBar pada tahun dasar analisis (2007)

$Y'_i$  = PDRB sektor ke-i pada Provinsi KalBar pada tahun akhir analisis (2011)

$Y_{..}$  = PDRB seluruh sektor Provinsi KalBar pada tahun dasar analisis (2007)

$Y'_{..}$  = PDRB seluruh sektor Provinsi KalBar pada tahun akhir analisis (2011)

$R_a = Y'_{..} / Y_{..}$

$R_i = Y'_i / Y_i$

$r_i = Y'_{ij} / Y_{ij}$

Kriteria keputusan yang dapat diambil untuk nilai *Shift Share* adalah :

- PR yang bernilai positif berarti wilayah tersebut tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan nasional rata – rata.
- PR yang bernilai negatif berarti pertumbuhan regional suatu wilayah lebih lambat dibandingkan pertumbuhan nasional rata – rata.
- PP yang bernilai positif berarti sektor ke-i sektor yang maju, sektor tersebut tumbuh lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
- PP yang bernilai negatif berarti sektor tersebut merupakan sektor yang lamban.
- PPW yang bernilai positif berarti sektor tersebut memiliki daya saing yang tinggi dalam wilayahnya sendiri.
- PPW yang bernilai negatif berarti sektor tersebut tidak memiliki daya saing dalam wilayahnya sendiri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Nilai LQ Menurut Sektor Perekonomian

Berdasarkan nilai perhitungan analisis LQ yang dilakukan terhadap sembilan sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2007-2011 dengan mengacu pada harga konstan 2000, maka didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2 Nilai LQ Sektor-Sektor Perekonomian di Kabupaten Kayong Utara  
Tahun 2007-2011 (Harga Konstan 2000)**

Sektor Perekonomian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata	Keterangan	Justification
Pertanian	1.74	1.75	1.65	1.69	1.71	1.71	<b>Basis</b>	Luas lahan tanaman pangan dan kontribusi $\pm 45\%$ dari PDRB
Pertambangan dan Penggalian	1.27	1.23	1.26	1.13	1.17	1.21	<b>Basis</b>	Pasir Urug dan tambang batu melimpah
Industri Pengolahan	1.03	1.02	1.10	1.07	1.08	1.06	<b>Basis</b>	Pertumbuhan Agribisnis dan Agroindustri
Listrik, Gas dan Air Minum	1.21	1.23	1.34	1.40	1.59	1.35	<b>Basis</b>	Meningkatnya jumlah penduduk dan sektor lain
Bangunan	0.36	0.38	0.41	0.40	0.39	0.38	Non Basis	Belanja pembangunan kantor pemerintah, infrastruktur lain masih rendah
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	0.55	0.55	0.57	0.57	0.56	0.56	Non Basis	Pasar rakyat, penginapan, rumah makan masih minim
Pengangkutan dan Komunikasi	0.39	0.37	0.36	0.34	0.33	0.35	Non Basis	Kerjasama antar kabupaten minim dan tantangan alam
Keuangan	0.76	0.78	0.82	0.82	0.83	0.80	Non Basis	Kemampuan terbatas/ bergantung pembiayaan pusat
Jasa-jasa	1.05	1.09	1.18	1.19	1.20	1.20	<b>Basis</b>	Adm.pemerintahan misalnya pembuatan sertifikat tanah

Sumber : Analisis Data Sekunder (olahan)

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa ada lima sektor perekonomian yang tergolong kepada sektor basis di Kabupaten Kayong Utara. Bila diurutkan berdasarkan nilai koefisien LQ tertinggi sampai terendah maka sektor pertanian berada pada peringkat pertama dengan nilai 1,71, kemudian diikuti dengan sektor listrik, gas dan air minum,

sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa, dan sektor industri pengolahan. Kelima sektor basis ini memperlihatkan keunggulan kompetitif dan nilai kontribusi yang besar dalam perekonomian Kabupaten Kayong Utara karena telah mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat. Sedangkan empat sektor lainnya adalah

sektor non basis yang merupakan sektor penunjang dari keberadaan sektor basis.

Bila dilihat potensi lahan pertanian yang digunakan untuk komoditi padi pada tahun 2011 adalah seluas 21.581 Ha atau memberikan kontribusi 98,62 persen dari

#### Nilai LQ Menurut Komoditi Pertanian (Sub Sektor Tanaman Bahan Pangan)

<b>Tabel 1.3 Nilai LQ Berdasarkan Luas Panen (Ha) Tahun 2008-2011</b>						
<b>Jenis Tanaman</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Keterangan</b>
Padi	1.140458	1.125092	1.118336	1.126653	1.127635	<b>Basis</b>
Jagung	0.003388	0.020234	0.223832	0.042231	0.072421	Non Basis
Ubi Kayu	0.119839	0.392135	0.260543	0.324851	0.274342	Non Basis
Ubi Jalar	0.391172	0.753927	0.432717	0.650026	0.55696	Non Basis
Kacang Tanah	0	0.401138	0.153789	0.178945	0.183468	Non Basis
Kacang Kedelai	0	0.088031	0.018792	0.092729	0.049888	Non Basis
Kacang Hijau	0	0.016895	0	0.020666	0.00939	Non Basis
Sumber : Analisis Data Sekunder (olahan)						

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa yang menjadi sektor basis untuk kategori luas areal panen dari tahun 2008-2011 adalah komoditi padi dengan nilai koefisien LQ rata-rata 1,13.

total luas lahan sub sektor tanaman bahan pangan. Jumlah ini merupakan gabungan dari luas panen padi sawah dan padi ladang.

#### Nilai LQ Berdasarkan Hasil Panen Per Hektar Tahun 2008-2011

<b>Tabel 1.4 Nilai LQ Berdasarkan Hasil Panen Per Hektar Tahun 2008-2011</b>						
<b>Jenis Tanaman</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Keterangan</b>
Padi	1.391953	1.128648	1.198495	1.048166	1.191816	<b>Basis</b>
Jagung	0.485295	0.464106	0.514173	0.51245	0.494006	Non Basis
Ubi Kayu	1.240721	1.120947	1.133462	1.200652	1.173945	<b>Basis</b>
Ubi Jalar	1.075679	1.029176	1.028087	0.948907	1.020462	<b>Basis</b>
Kacang Tanah	0	0.984774	0.974508	0.833243	0.698131	Non Basis
Kacang Kedelai	0	0.905746	0.799504	0.756825	0.615519	Non Basis
Kacang Hijau	0	0.884717	0	0.838616	0.430833	Non Basis
Sumber : Analisis Data Sekunder (olahan)						

Tabel 1.4 dapat terlihat bahwa ada tiga jenis komoditi tanaman bahan pangan yang merupakan sektor basis yaitu padi, ubi kayu, dan ubi jalar. Ketiga jenis komoditi ini dari tahun 2008-2009 memiliki produktivitas yang selalu lebih tinggi daripada komoditi yang sama di Propinsi Kalimantan Barat. Hal ini juga terbukti dengan nilai LQ yang tertera pada

tabel diatas. Artinya komoditi padi, ubi kayu, dan ubi jalar mampu bersaing dengan daerah kabupaten/kota lain di Propinsi Kalimantan Barat dalam hal produktivitas. Adapun faktor yang dapat mendukung produktifitas komoditi basis ini adalah sumberdaya alam yang mendukung disertai teknik budidaya yang baik.

#### **Nilai LQ Berdasarkan Produksi (Ton) Tahun 2008-2011**

<b>Tabel 1.5 Nilai LQ Berdasarkan Produksi (Ton) Tahun 2008-2011</b>						
<b>Jenis Tanaman</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>Keterangan</b>
Padi	1.274032	1.207468	1.220816	1.184862	1.221795	<b>Basis</b>
Jagung	0.00149	0.008928	0.104808	0.021732	0.03424	Non Basis
Ubi Kayu	0.129511	0.417997	0.269225	0.391211	0.301986	Non Basis
Ubi Jalar	0.366756	0.737752	0.405723	0.617971	0.532051	Non Basis
Kacang Tanah	0	0.368184	0.134468	0.148349	0.16275	Non Basis
Kacang Kedelai	0	0.075832	0.013687	0.070414	0.039983	Non Basis
Kacang Hijau	0	0.023706	0	0.014094	0.00945	Non Basis
Sumber : Analisis Data Sekunder (olahan)						

Tabel 1.5 dapat terlihat bahwa hanya komoditi padi yang menjadi basis dalam hal produksi. Jenis padi sawah merupakan yang mendominasi produksi padi di Kabupaten Kayong Utara yaitu sekitar 99,28 persen dari total produksi padi, atau sekitar 67.930 ton, sisanya adalah dari padi ladang yaitu 0,72 persen atau 491 ton. Kondisi ini menunjukkan capaian positif hasil kerja pemerintah khususnya instansi terkait dalam upaya meningkatkan intensifikasi di bidang pertanian. Produksi padi di Kabupaten Kayong Utara menyumbang 4,98 persen terhadap total produksi padi Propinsi Kalimantan Barat.

#### **Dinamika/Proyeksi dan Kinerja Sektor Ekonomi Kabupaten Kayong Utara**

Kinerja dari sektor pertanian dan sektor perekonomian lainnya di masa yang akan datang di Kabupaten Kayong Utara dapat diketahui dengan menggunakan metode DLQ. Hasil perhitungan DLQ terhadap sektor perekonomian akan menunjukkan apakah sektor tersebut mengalami peningkatan kinerja, penurunan atau kinerjanya stabil di masa sekarang dan pada masa mendatang. Menurut kaum klasik pembangunan ekonomi di daerah yang kaya dengan SDA akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin SDA.

**Tabel 1.6 Nilai DLQ Dinamika/Proyeksi dan Kinerja Sektor Ekonomi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2007-2011**

No	Sektor Perekonomian	Rata-rata LQ	DLQ	Keterangan
1	Pertanian	1.71	0.941336	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1.21	0.698687	Non Basis
3	Industri pengolahan	1.06	1.189233	<b>Basis</b>
4	Listrik, Gas, dan Air Minum	1.35	2.993274	<b>Basis</b>
5	Bangunan/Konstruksi	0.38	1.512576	<b>Basis</b>
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	0.56	1.122221	<b>Basis</b>
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0.35	0.536744	Non Basis
8	Keuangan	0.80	1.4289	<b>Basis</b>
9	Jasa-jasa	1.20	1.665969	<b>Basis</b>

Sumber : Analisis Data Sekunder (olahan)

Tabel 1.6 menunjukkan bahwa sektor perekonomian yang diproyeksikan menjadi sektor basis dimasa yang akan datang adalah sektor listrik, gas, dan air minum, sektor jasa-jasa, sektor bangunan/konstruksi, sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor listrik, gas, dan air minum memiliki nilai DLQ tertinggi (2,99). Artinya sektor ini tetap bisa menjadi sektor basis dimasa yang akan datang. Hal ini bisa terlihat dari nilai PDRB sektor listrik, gas dan air minum dari tahun 2007 sampai dengan 2011 dimana nilai PDRB sektor ini selalu meningkat. Dilihat dari nilai LQ yang ada pada Tabel 1.6 juga menunjukkan kenaikan setiap tahunnya.

### **Analisis Shift Share**

PDRB Kabupaten Kayong Utara pada tiap tahunnya dapat dibandingkan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Barat untuk melihat kinerja dari berbagai sektor

perekonomian dengan mengacu pada tahun dasar analisis dan tahun akhir analisis. Dalam pembangunan daerah Kabupaten Kayong Utara, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor-sektor perekonomiannya adalah komponen pertumbuhan wilayah. Komponen pertumbuhan wilayah dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pertumbuhan Regional (PR), Pertumbuhan Proporsional (PP), dan Pertumbuhan Pangsa Wilayah (PPW). Jika pertumbuhan ketiga komponen pertumbuhan wilayah ini bernilai positif, maka laju pertumbuhan sektor-sektor perekonomian di Kabupaten Kayong Utara meningkat dari tahun ke tahun.



**Tabel 1.7 Analisis *Shift Share* Komponen Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2007-2011**

No	Sektor Perekonomian	PRij	PPij	PPWij	Yij
1	Pertanian	39.127,15	-6120,15	-5115,86	27.891,14
2	Pertambangan dan Penggalian	1.786,64	1.289,17	-1.023,86	2.051,95
3	Industri pengolahan	17.024,07	-11.257,87	2.603,38	8.369,58
4	Listrik, gas, dan air minum	460,54	-53,90	716,17	1.122,8
5	Bangunan/ konstruksi	2.496,50	1.308,25	1.407,23	5.211,99
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	10.259,62	-26,36	987,75	11.221,01
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.650,69	3.590,39	-2693,77	3.547,31
8	Keuangan	3.758,63	-123,45	1.609,76	5.244,94
9	Jasa-jasa	10.762,79	781,53	7.139,27	18.683,6
	Total	88.326,64			

Sumber : Analisis Data Sekunder (olahan)

Tabel 1.7 dapat terlihat bahwa berdasarkan komponen PR, Sektor yang memiliki pertumbuhan paling cepat di Kabupaten Kayong Utara bila dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat adalah sektor pertanian dengan nilai PR paling tinggi dari seluruh sektor yakni sebesar Rp.39.127,15 juta, menyusul kemudian sektor-sektor lainnya dan sektor yang memiliki nilai PR terendah adalah sektor listrik, gas, dan air minum dengan Rp.460,54 juta. Jika terjadi perubahan kebijakan ekonomi oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maka sektor pertanian akan mengalami perubahan yang paling besar diikuti dengan sektor perekonomian lainnya.

Komponen pertumbuhan proporsional (PP) memperlihatkan sektor yang mengalami penurunan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara adalah sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air minum, sektor perdagangan, dan sektor keuangan. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Kayong Utara

adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Sektor yang memiliki nilai PP terbesar ( $PP_{ij} > 0$ ) adalah sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp.3.590,39 juta. Bila dilihat dari nilai PR maka sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbang PDRB, namun pertumbuhan sektor ini lebih lambat dari sektor pengangkutan dan komunikasi hal ini terlihat dari nilai PP sektor pertanian Rp.-6120,15 juta.

Jika dilihat dari nilai PPW positif ( $PPW_{ij} > 0$ ), sektor yang memiliki daya saing yang baik adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air minum, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor keuangan, dan sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang berdayasaing rendah adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pengangkutan dan komunikasi yang ditandai dengan PPW bernilai negatif. Ketiga sektor ini belum mampu bersaing dengan sektor yang sama di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Keadaan ini juga sama

dengan hasil perhitungan DLQ yang menyatakan bahwa ketiga sektor tersebut belum bisa dijadikan sektor unggulan atau basis di masa yang akan datang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil dari perhitungan nilai LQ atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2007-2011 diketahui bahwa sektor pertanian merupakan sektor unggulan dan memiliki kontribusi besar di Kabupaten Kayong Utara diikuti dengan sektor listrik, gas, dan air minum, sektor pertambangan dan penggalian, sektor jasa-jasa, dan sektor industri pengolahan. Hasil dari perhitungan nilai LQ atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2008-2011 untuk komoditi pertanian sub sektor tanaman bahan pangan di Kabupaten Kayong Utara dilihat dari luas panen dan produksinya komoditi padi menjadi basis satu-satunya. Untuk hasil panen per hektar ada tiga komoditi basis yaitu padi, ubi kayu, dan ubi jalar.
2. Berdasarkan hasil perhitungan DLQ dan Shift Share diketahui bahwa sektor pertanian belum bisa menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Sedangkan sektor basis Kabupaten Kayong Utara di masa yang akan datang adalah sektor listrik, gas, dan air minum, sektor jasa-jasa, sektor bangunan, sektor keuangan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran.

### **B. Saran**

1. Terkait dengan alih fungsi lahan pemerintah harus konsisten terhadap perencanaan pembangunan berdasarkan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan harus segera merealisasikan yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Secara hierarki penyusunan RPJPD ini harus mengacu kepada RPJPD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJP Nasional.
2. Menseleksi secara ketat setiap masyarakat yang ingin mengajukan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada pemerintah agar memperhatikan potensi lahan sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang mengakibatkan produksi pertanian dalam hal ini padi menjadi menurun pada masa yang akan datang.
3. Pemerintah Kabupaten Kayong Utara harus meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, mengoptimalkan alokasi anggaran bidang pembangunan infrastruktur guna mendorong pencapaian akselerasi pembangunan khususnya pada daerah yang masih sulit dijangkau seperti Kecamatan Pulau Maya dan Kecamatan Karimata yang memiliki potensi perikanan yang sangat besar.
4. Sektor ketenagalistrikan terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan pasokan listrik yang kondisinya makin kritis di berbagai daerah. Pemerintah secepatnya menyelesaikan pembangunan PLTGB dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar lingkungan

industri sebagai solusi dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sub sektor listrik.

5. Diperlukan terobosan dalam kebijakan untuk mengembangkan sektor-sektor yang memiliki potensi menjadi sektor basis di masa mendatang berdasarkan nilai LQ dan DLQ dengan berbagai cara misalnya memodifikasi sektor primer seperti pertanian dengan sektor lain sehingga tercipta sektor penunjang seperti agroindustri, agrowisata, agribisnis, dan lain-lain, serta mempertahankan lahan potensial untuk sektor pertanian.
6. Seluruh masyarakat Kabupaten Kayong Utara dapat menjaga ketersediaan sumberdaya alam yang potensial di Kabupaten Kayong Utara agar sektor pertanian dapat terus diandalkan di masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Aser, F. 2005. *Tujuan Otonomi Daerah Dalam UU No. 32 Tahun 2004*. Jurnal Otonomi Daerah. 1 : 45-48.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2012. *Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2011*. BPS Propinsi KalBar. Pontianak.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kayong Utara. 2012. *Pendapatan Daerah Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha*. BPS KKKU
- Daryanto, A dan Yundy Hafizrianda. 2010. *Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- Departemen Pertanian. 2005. *Landasan Teoritis dan Fakta Empiris* <http://www.deptan.go.id/konsep/landasan.htm>. [28 Feb 2005].
- Lemhanas Jakarta. 1997. *Pembangunan Nasional*. PT. Balai Pustaka-Lemhanas, Jakarta.
- Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES.
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Saefulhakim S. 2004. *Model Input – Output. Bahan Perkuliahan Analisis Kuantitatif Sosial Ekonomi Spasial*. Program Studi Perencanaan Wilayah. Sekolah Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor.
- Sukirno, S. 1985. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. LPFE UI. Jakarta.
- Suyatno. 2000. *Analisa Economic Base Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tingkat II Wonogiri: Menghadapi Implementasi UU No. 22/1999 dan UU No. 5/1999*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol I No. 2 Desember 2000: 144-159. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- Wijaya, A. 1996. *Pilihan Pembangunan Industri : Kasus DKI Jakarta*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, No IV (2).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 – 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum